



PENGUATAN KOMITMEN P3DN DALAM RANGKA PERIZINAN PENGGUNAAN PRODUK IMPOR DI PEMERINTAHAN KABUPATEN GARUT

Wahyu Adam¹⁾, Somadi²⁾

¹⁾ Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Bisnis, Universitas Wanita Internasional, Bandung, Indonesia

Email: wahyuadamipa58@gmail.com

²⁾ Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Bisnis, Universitas Wanita Internasional, Bandung, Indonesia

Email: somadi897@gmail.com

Abstrak

In this era of globalization, activities aimed at meeting increasing market needs sometimes force the government to import products. The government imports many goods to support the Indonesian economy in various fields such as infrastructure, industry, health, and others. This is due to the limitations of technology, the quality and quantity of products. The Indonesian government itself has created the Domestic Product Use Improvement (P3DN) to maximizing the use of domestically produced products. The purpose of this study is to determine P3DN commitment, and strategies undertaken to strengthening P3DN commitment in the Garut City local government environment. In addition, this research is also to find information about the licensing procedures for using imported products if domestic products do not meet the criteria or quantity needed by an local goverment. This research uses a qualitative approach by conducting in-depth interviews, field observations, and collecting secondary data from trusted sources. The results showed that the P3DN commitment of the Garut City government was very high. The obstacles on strengthening this P3DN commitment are the absence of local products that can substitute imported products, this still dominate in several fields. In addition, the quality and quantity that have not met the standards are also an obstacle to this P3DN program that cannot be equalized. The P3DN team of Garut City often conducts socialization and e-catalog optimization to increase the use of domestic products in the Garut City government. This research also obtained information related to licensing the use of imported products if there are no domestic products that meet the needs

Kata Kunci: P3DN Commitment, Procedure Licensing, Import Product.

Abstract

Di era globalisasi ini kegiatan pemenuhan kebutuhan pasar yang semakin meningkat terkadang memaksa pemerintah untuk melakukan impor produk. Pemerintah mengimpor banyak barang untuk mendukung perekonomian Indonesia diberbagai bidang seperti bidang infrastruktur, industri, kesehatan dan lain sebagainya. Hal dikarenakan adanya keterbatasan teknologi, kualitas dan kuantitas produk. Pemerintah Indonesia sendiri telah membuat program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dengan tujuan untuk memaksimalkan penggunaan produk yang diproduksi dalam negeri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui komitmen P3DN, hambatan dan strategi yang dilakukan untuk menguatkan komitmen P3DN di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Garut. Selain itu, penelitian ini juga untuk mengetahui prosedur perizinan penggunaan produk impor jika produk dalam negeri tidak memenuhi kriteria atau kuantitas yang dibutuhkan oleh suatu instansi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara secara mendalam, observasi lapangan, serta pengumpulan data sekunder dari sumber-sumber terpercaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen P3DN pemerintah Kabupaten Garut sangat tinggi. Hambatan yang dihadapi dalam penguatan komitmen PDN ini adalah belum adanya produk local yang bisa mensubstitusi produk impor yang masih mendominasi dalam bebeapa bidang. Selain itu, kualitas dan kuantiti yang belum memenuhi standar juga menjadi hambatan program P3DN ini belum bisa disama ratakan. Sehingga tim P3DN kabupaten garut sering melakukan sosialisasi dan pengoptimalan e-katalog untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri di pemerintahan Kabupaten Garut. Pada penelitian ini juga didapatkan informasi terkait perizinan penggunaan produk impor jika tidak ada produk dalam negeri yang memenuhi kebutuhan.

Keywords: Komitmen P3DN, Prosedur Perizinan, Produk Impor.



PENDAHULUAN

Di era globalisasi ini kegiatan pemenuhan kebutuhan pasar yang semakin meningkat terkadang memaksa pemerintah untuk melakukan impor produk (Ayunani, 2023). Pemerintah mengimpor banyak barang untuk mendukung perekonomian Indonesia diberbagai bidang seperti bidang infrastruktur, industri, kesehatan dan lain sebagainya. Tidak semua produk yang diproduksi dalam negeri dapat memenuhi kebutuhan dikarenakan adanya keterbatasan teknologi, kualitas dan kuantitas produk. Sehingga pemerintah harus melakukan impor agar kebutuhan produknya dapat terpenuhi (Ayunani, 2023). Dalam data statistik impor tahun 2020-2024 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan nilai impor sebesar 5% dari tahun 2020 hingga 2022. Pada tahun 2022 menjadi nilai impor tertinggi selama 5 tahun terakhir yaitu sebesar US\$ 237.447,1 (Juta). Hal ini menunjukkan bahwa Negara kita memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap produk impor. Sehingga membuat pemerintah terus menerus melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan di negaranya. Dari banyaknya nilai impor tersebut masih di dominasi oleh impor migas dan non-migas yang relatif meningkat dari tahun ke tahun.

Selain itu, dalam data yang dipublikasikan oleh International Trade Administration juga di jelaskan bahwa pasar alat kesehatan Indonesia pada tahun 2021 mencapai US\$3.586 juta dengan impor total US\$2.633 juta. Produksi dalam negeri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan, sehingga sekitar 90% bahan baku obat (BBO) dan alat kesehatan yang digunakan di Indonesia diimpor. Produksi dalam negeri sebagian besar berfokus pada produk sekali pakai, seperti masker bedah, sarung tangan, dan tempat tidur rumah sakit.

Secara perekonomian, pemerintah Indonesia berharap dengan melakukan impor dapat memenuhi kebutuhan negaranya. Namun, terlalu banyak melakukan impor juga tidak baik dikarenakan mempengaruhi perekonomian secara nasional. Impor produk berlebih berdampak negatif dan bisa memicu inflasi di suatu Negara (Rangkuty & Nasution, 2018). Sehingga perlu dilakukan cara untuk mencegah terlalu banyaknya peredaran dan penggunaan produk impor berlebihan (Sembiring, 2018).

Pemerintah Indonesia sendiri telah membuat program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dengan tujuan untuk memaksimalkan penggunaan produk yang diproduksi dalam negeri. Dalam rangka menjamin kemandirian dan stabilitas perekonomian nasional, diharapkan implementasi program P3DN dapat meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat Indonesia dengan mendorong masyarakat untuk mencintai dan menggunakan produk dalam negeri, memberdayakan industri dalam negeri, memperkuat struktur industri dalam negeri, dan memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah (Turnip, 2023).

Dalam kegiatan Pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. dijelaskan bahwa peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional merupakan kebijakan

menyeluruh pemerintah dalam PBJ (Saragi, 2023). Adapun Undang-Undang No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mengatur bahwa pemerintah atau instansi wajib menggunakan produk dalam negeri dalam kegiatan pengadaan barang atau jasa. Tujuannya adalah memperkuat struktur ekonomi, mendorong industri lokal, dan meningkatkan kemandirian negara dalam menghadapi tantangan global

Kabupaten Garut sebagai salah satu kabupaten yang sedang berkembang di Jawa Barat tidak luput dari dari produk impor dalam pemenuhan kebutuhan barang/ jasa pemerintahan daerahnya tentunya ikut terlibat dalam memaksimalkan produk dalam negeri di lingkungan pemerintahannya. Hal ini disebabkan karena kinerja dan kegiatannya masih menggunakan produk impor dikarenakan memiliki kualitas yang lebih baik dari pada produk lokal. Sehingga beberapa instansi masih mengajukan perizinan impor produk yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhannya.

Secara nasional dalam pelaksanaan program P3DN Tahun 2024, pemerintahan daerah Kabupaten Garut mencapai nilai komitmen terhadap pembelian produk dalam negeri sebesar 61.65% dalam rencana pembelanjaan daerah.. Sehingga dengan adanya program P3DN ini diharapkan dapat membuat masyarakat dan khususnya pemerintah untuk tidak memiliki rasa ketergantungan tinggi terhadap produk impor. Sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan strategi agar instansi pemerintah dapat meningkatkan komitmen penggunaan produk dalam negeri. Namun ada beberapa permasalahan yang terjadi di lapangan yang mempengaruhi pelaksanaan program P3DN. Sehingga diperlukan strategi untuk meningkatkan komitmen terhadap pelaksanaan Program P3DN (Riyanto & Priambodo, 2024).

Implementasi program ini memiliki peran yang besar dalam kemajuan industri dan pemerintahan. Namun, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program P3DN salah satunya kurangnya informasi terkait rencana alokasi belanja minimal maka diperlukan alternatif lain yang dapat digunakan untuk mengganti produk impor yang akan digunakan. Jika memang sangat membutuhkan produk impor dan produk tersebut tidak diproduksi di negara sendiri. Sehingga perlu kejelasan bahwa adanya prosedur yang jelas dalam melaksanakan perizinan impor produk (Fenora et al., 2022). Karena berdasarkan observasi dilapangan, sering kali dalam hal pengadaan barang atau produk impor dalam lingkungan pemerintahan kabupaten, proses perizinan ditolak oleh lembaga berwenang dikarenakan berbagai pertimbangan seperti prosedur pengajuan izin yang masih belum diketahui oleh semua pihak khususnya oleh instansi pemerintah.

METODOLOGI PENELITIAN

Ditinjau dari pendekatan yang digunakan pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Menurut Moloeng (2010) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami secara menyeluruh apa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, tindakan, dan lain-lain, dengan menggunakan berbagai metode ilmiah dan



mendeskripsikannya dalam kata-kata atau bahasa dalam konteks alami.. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara kepada para informan dari Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa (UKPBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten Garut, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energy dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut, pelaku industri local, dan penyedia barang/jasa local.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komitmen P3DN

Berdasarkan wawancara para informan, bahwa komitmen Pemerintah Kabupaten Garut terhadap pelaksanaan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) tergolong sangat tinggi. Komitmen ini tercermin dengan banyaknya instansi yang mulai menerapkan prinsip-prinsip penggunaan produk dalam negeri secara konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Garut sangat mendukung setiap instansinya untuk berkomitmen tinggi terhadap produk dalam negeri khususnya dalam hal pengadaan barang/jasa. Sehingga terjalin sinergi yang baik antara kebijakan pemerintah pusat dengan impelentasi di tingkat pemerintahan daerah.

Pada tahun 2024, tingkat pencapaian komitmen oleh beberapa instansi pemerintah menunjukkan hasil yang tinggi. Dimana sebagian besar instansi pemerintahan daerah Kabupaten Garut telah memenuhi komitmen minimal sebesar 40%. Pencapaian ini menjadi bukti keberhasilan program tersebut. Dengan demikian, tim P3DN telah berhasil memotivasi instansi untuk berpartisipasi secara aktif dalam program P3DN ini. Pada pertengahan tahun 2025, didapatkan data bahwa terdapat beberapa instansi yang telah memenuhi batas minimal komitmen P3DN ini. Dimana instansi tersebut memang memiliki komitmen yang tinggi pada tahun sebelumnya. Keberhasilan ini harus dapat dipertahankan dengan memonitoring dan pembinaan yang berkelanjutan.

Menurut Darmadi, (2016) ada beberapa faktor yang mempengaruhi komitmen diantaranya :

1. Faktor individu. Perbedaan individu akan mempengaruhi keputusan yang berdampak pada tujuan yang telah di tetapkan.
2. Faktor organisasional. Seperti keamanan, loyalitas dan intensif yang diterima.
3. Fektor relasional. Beberapa komitmen didasarkan akan relasi yang dibangun oleh sebagian pihak.

Komitmen yang tinggi terhadap penggunaan produk dalam negeri nyatanya memberikan dampak yang cukup positif terhadap perekonomian Negara. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Sirieix *et al.* (2011), yang menyatakan bahwa terdapat produk local di wilayahnya yang memiliki banyak kelebihan jika di dibandingkan dengan menggunakan produk impor. Selain itu, penelitian Dimand & Neshkova (2023), menyatakan bahwa pemerintah harus lebih banyak menggunakan produk local dalam memenuhi kebutuhannya. Sehingga dapat mendorong kegiatan industry local untuk berkontribusi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah (Sumarno & Nugroho, 2024).

Prosedur Perizinan Penggunaan Produk Impor

Proses perizinan dimulai dari adanya kebutuhan instansi terhadap produk yang tidak tersedia dalam katalog PDN. Instansi yang bersangkutan harus terlebih dahulu menyampaikan permohonan persetujuan penggunaan produk impor secara resmi kepada Tim P3DN Kabupaten Garut melalui Disperindag ESDM selaku sekretariat P3DN. Permohonan ini bersifat administratif dan harus dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung sebagai persyaratan awal. Setelah permohonan diajukan, pihak sekretariat akan meminta instansi pemohon untuk menghadiri pertemuan awal yang membahas kelengkapan dan kesesuaian dokumen, sekaligus menyosialisasikan proses yang akan dilalui serta kriteria yang harus dipenuhi agar permohonan tersebut dapat dilanjutkan ke tahap rapat teknis.

Terkait persyaratan, beberapa dokumen penting yang harus ditinjau dan dipenuhi oleh instansi yang mengajukan perizinan. Pertama, dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) digunakan sebagai bukti bahwa ada anggaran yang dialokasikan untuk membeli barang yang dimaksud. Selain itu, dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang diperoleh dari aplikasi SIRUP digunakan untuk menunjukkan bahwa barang tersebut telah disetujui untuk dibeli. Ketiga, menurut Peraturan Bupati, produk yang dibeli harus tertera pada Standar Satuan Harga (SSH) yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Garut. Keempat kajian produk menjelaskan kebutuhan produk dan alasan tidak dapat digunakan di negara ini. Kelima, tangkapan layar, atau *screenshot*, dari hasil pencarian produk di e-katalog lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (LKPP) digunakan untuk menunjukkan bahwa produk tersebut tidak tersedia di pasar dalam negeri. Keenam, bahan presentasi atau paparan yang akan diberikan selama sesi teknis berlangsung. Ketujuh, surat permohonan resmi yang telah ditandatangani oleh pengguna anggaran (PA), sebagai bentuk pertanggungjawaban dan otorisasi permohonan.

Setelah dipastikan kelengkapan persyaratan yang diberikan, maka akan dilaksanakan rapat teknis perizinan penggunaan produk impor. Rapat dilaksanakan di Disperindag ESDM dengan dihadiri oleh UKPBJ sebagai fasilitator utama, instansi yang mengajukan, dan bidang fasilitas perbedaan penafsiran TKDN yang terdiri dari kejaksaan negeri, inspektorat daerah, BPKAD, bagian hukum, organisasi, dan pihak terkait lainnya. Dalam rapat teknis, instansi yang mengajukan permohonan penggunaan produk impor diberikan kesempatan untuk memaparkan tentang produk yang diajukan beserta dokumen pendukungnya untuk dianalisa. Setelah itu, tim P3DN akan memberikan masukan tentang produk yang diajukan untuk diizinkan penggunaannya. Jika memang terbukti bahwa produk yang dizinkan tidak tersedia di dalam negeri dan sifatnya PDN, maka akan diterbitkan surat persetujuan penggunaan produk impor. Namun, jika ditemukan produk serupa yang PDN, maka akan diterbitkan surat penolakan penggunaan produk impor oleh tim P3DN. Dalam pemberian rekomendasi produk dilakukan berdasarkan hirarki P3DN yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.



Hambatan Penguatan Komitmen P3DN

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diidentifikasi bahwa dalam penguatan komitmen program peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) di Kabupaten Garut menghadapi beberapa hambatan. Salah satu hambatan utamanya adalah masih belum tersedianya produk yang dapat memenuhi kualitas dan kuantitas sesuai dengan kebutuhan instansi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan nasional untuk menggunakan produk dalam negeri dengan keadaan dilapangan. Karena masih ada instansi yang membutuhkan produk dengan standar tertentu untuk menunjang kinerja dan pelayanan publiknya. Kesenjangan yang dapat dilihat adalah dimana instansi produk dalam negeri masih belum memiliki standar yang diinginkan jika dibandingkan dengan produk impor.

Dalam proses wawancara para informan juga menyebutkan bahwa, sektor kesehatan menjadi sektor dengan ketergantungan tertinggi terhadap produk impor. Hal ini dibuktikan dengan hampir semua alat kesehatan, obat-obatan, hingga bahan baku obat yang digunakan di berbagai fasilitas kesehatan yang merupakan produk impor yang menandakan bahwa kita masih bergantung terhadap produk luar negeri. Hal ini disebabkan karena kualitas produk dalam negeri masih belum mampu memenuhi standar mutu, spesifikasi teknis dan keandalan yang dibutuhkan untuk melakukan pelayanan medis. Menurut Windarti dan Ibrahim (2017) kualitas produk merupakan kondisi yang berhubungan dengan produk, jasa manusia, dan lingkungan untuk memenuhi harapan konsumen atau bisa juga didefinisikan sebagai kesesuaian kebutuhan dan keinginan produk dengan spesifikasi produk.

Menurut Tjiptono & Chandra, (2016) terdapat lima perspektif kualitas produk yaitu :

- 1) *Transcendental Approach*. Perspektif ini didasarkan pada berbagai macam pengalaman dari eksplorasi produk berkali-kali
- 2) *Product-based Approach*. perspektif ini bersifat objektif sehingga kelemahannya tidak dapat menjelaskan perbedaan dalam selera, kebutuhan, atau segmen pasar tertentu.
- 3) *User-Based Approach*. perspektif ini bersifat subjektif dan berorientasi pada permintaan. Setiap konsumen memiliki kebutuhan dan keinginan berbeda. Oleh karena itu, kualitas produk sesuai dengan tingkat kepuasan tertinggi yang dapat dicapai oleh konsumen. sehingga jika seseorang mengatakan kualitas satu produk baik, belum tentu dengan orang lain.
- 4) *Manufacturing-based*. Perspektif yang berbasis pasokan dan lebih berkonsentrasi pada proses manufaktur dan perekayasaan, serta definisi kualitas sebagai pemenuhan persyaratan. Dalam konteks bisnis, kualitas memiliki karakteristik operasi. Ancaman semacam ini menjadi lebih jelas karena penyesuaian spesifikasi produk dan operasi yang dilakukan secara internal dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya. Standar konsumen adalah yang dapat menentukan kualitas, bukan konsumen yang membeli dan menggunakan produk tersebut

- 5) *Value-based Approach*. Perspektif ini menggabungkan elemen kualitas dengan elemen nilai (*value*) dan harga (*price*). Menurut perspektif ini, kualitas belum tentu merupakan produk yang bernilai, karena kualitas bersifat relatif. Namun, pelanggan yang membeli barang atau jasa yang tepat akan paling berharga.

Permasalahan kualitas produk diperparah dengan keterbatasan jumlah produk dalam negeri yang tersedia di e-katalog nasional. Berdasarkan informasi para informan, terdapat beberapa instansi yang belum menemukan produk-produk yang sifatnya khusus tidak tersedia dalam e-katalog. Hal ini membuat mereka mengajukan produk impor untuk digunakan. Selain itu, terdapat penyedia yang mencantumkan nilai TKDN yang tidak sesuai dengan aslinya. Ketidaksesuaian ini berupa nilai TKDN di e-katalog dengan sertifikat TKDN resmi dari kementerian perindustrian. Situasi ini menimbulkan keraguan dan kendala administratif bagi instansi yang melakukan pengadaan dan mempengaruhi perhitungan komitmen P3DN instansi. Sehingga perlu dilakukan perbaikan dan pengecekan nilai TKDN yang tertera di e-katalog dengan sertifikat resmi dari Kementerian Perindustrian.

Strategi Penguatan Komitmen P3DN

Upaya meningkatkan komitmen terhadap program P3DN ini, pemerintahan daerah Kabupaten Garut beserta tim P3DN melakukan optimalisasi kegiatan sosialisasi kepada SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Garut. sosialisasi yang dilakukan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang program P3DN ini. P3DN ini merupakan program pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk impor dan memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri. Program ini mewajibkan setiap instansi untuk menggunakan produk dalam negeri dari pada produk impor. Dengan dilakukannya sosialisasi diharapkan seluruh SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Garut, dapat memiliki kesadaran dan tanggung jawab untuk berperan aktif dalam kegiatan tersebut. Strategi ini menjadi kunci keberhasilan tim P3DN dalam menyebarluaskan informasi terkait program P3DN.

Sosialisasi yang dilakukan tidak hanya bersifat satu arah, tapi juga harus menjadi dua arah dimana terjadi komunikasi antara Tim P3DN Kabupaten Garut dengan para SKPD terkait komitmen bersama dalam program P3DN ini. Dengan demikian, SKPD bukan hanya sebagai penerima kebijakan tapi juga sebagai pelaku aktif dalam program P3DN ini. Komunikasi dua arah tersebut diharapkan SKPD dapat memahami peran dan kontribusinya secara spesifik. Sehingga jika ditemukan tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh SKPD maka tim P3DN akan membantu menemukan solusi yang efektif untuk mengatasi kendala atau hambatan yang dihadapi.

Menurut Arwildayanto *et al.*, (2018) menjelaskan tentang tahapan sosialisasi suatu kebijakan, yaitu :

1. Tahap Persiapan (*Preparatory Stage*). Pada tahap ini para pemangku kebijakan akan menganalisis alasan, keuntungan dan efek dari kebijakan yang akan diimplementasikan. Dimana ada tahap ini semua pihak



yang menjadi target pelaksanaan kebijakan akan mempersiapkan diri dan memahami tentang standar pelaksanaan kebijakan. Hal ini memudahkan proses penerimaan kebijakan dan dapat dilakukan dengan mudah karena prinsip pelaksanaan telah pahami oleh target kebijakan.

2. Tahap Meniru (*Play Stage*). Tahap ini ditandai dengan semakin beradaptasi target dengan kebijakan yang akan dibuat. Pada tahap ini juga, kesadaran tentang kebijakan baru mulai muncul. Target kebijakan mulai mengetahui apa yang dilakukan dan apa yang diharapkan dari kebijakan tersebut. Sehingga Kesadaran kolektif terhadap kebijakan mulai sempurna.
3. Tahap Siap Bertindak (*Game Stage*). Pada tahap ini, kemampuan adaptasi terhadap kebijakan meningkat dan memahami peraturan yang berlaku terkait kebijakan yang dilakukan. Sehingga kehati-hatian dalam bertindak menjadi lebih berkurang dikarenakan pemahaman yang meningkat.

Selain sosialisasi, pemaksimalan e-katalog menjadi salah satu kunci penting dalam penguatan komitmen pemerintah terhadap program P3DN ini. Penggunaan e-katalog bukan hanya mempercepat proses pengadaan tetapi juga menjadi media informasi yang transparan dan terverifikasi terkait TKDN dan BMP produk yang dibutuhkan. Dengan informasi tersebut, memudahkan instansi untuk memilih produk dalam negeri sesuai dengan kebutuhan namun tetap berlandaskan pada program P3DN itu sendiri.

E-katalog juga berfungsi sebagai alat kontrol yang efektif untuk memastikan kepatuhan instansi yang melakukan pengadaan barang/jasa terhadap kebijakan nasional. Sistem e-katalog ini memudahkan pemerintah pusat untuk melakukan pengawasan secara *real-time* terkait seberapa besar penggunaan produk dalam negeri di setiap instansi daerah. Dengan adanya e-katalog ini juga membuat setiap transaksi pengadaan barang/jasa terekam secara digital dan transparan. Hal ini membuat pemerintah daerah untuk lebih berhati-hati dan selektif dalam memilih produk local dari pada produk impor.

Analisis SWOT

Setelah melakukan pembahasan terkait strategi yang dapat dilakukan oleh tim P3DN Kabupaten Garut. Penulis melakukan analisis SWOT untuk mengidentifikasi berbagai factor untuk merumuskan strategi yang optimal dalam menguatkan komitmen P3DN di lingkungan pemerintahan Kabupaten Garut. Analisis swot dilandaskan pada logika dengan memaksimalkan dan mengoptimalkan factor pendukung seperti kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunity*), dengan tetap mengidentifikasi dan mengevaluasi kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*) yang mempengaruhi perusahaan untuk mencapai tujuan (Assauri, 2018).

Dalam melakukan identifikasi lingkungan internal tim P3DN Kabupaten Garut, meliputi kekuatan dan kelemahan, dan lingkungan eksternal yang mencakup ancaman dan peluang. Penulis menemukan ada beberapa strategi yang dapat peneliti sarankan untuk menguatkan

komitmen P3DN pemerintah daerah Kabupaten Garut, yaitu sebagai berikut :

1. Faktor Internal

Berikut ini adalah faktor internal komitmen P3DN Kabupaten Garut yang terdiri dari aspek kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*).

a. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan (*Strength*) merupakan kondisi internal yang menunjang untuk perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Berikut adalah aspek kekuatan dari program P3DN Kabupaten Garut :

- 1) Komitmen Pemerintah Daerah terhadap program P3DN Tinggi. Hal ini dibuktikan dengan Kabupaten Garut tercatat sebagai kabupaten dengan komitmen tertinggi terhadap P3DN pada tahun 2024 secara nasional.
- 2) Kerja sama dan koordinasi yang aktif antar selaku tim P3DN. Penguatan dilakukan melalui koordinasi antara Disperindag, BPKAD, Bagian hukum, dan Kejaksaan negeri, mencerminkan pengawasan komprehensif semua pihak yang terjalin dengan aktif dan baik.
- 3) Sosialisasi aktif. Pemerintah daerah secara aktif melakukan edukasi dan sosialisasi pentingnya P3DN bagi kemandirian daerah dan nasional.
- 4) Pemanfaatan dan pengoptimalan sistem e-katalog. Penggunaan e-katalog mendukung keterbukaan, efisiensi, dan pengawasan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Berikut adalah tabel dari kekuatan (*strength*) komitmen P3DN Kabupaten Garut :

Tabel 1 . Kekuatan Komitmen P3DN Kabupaten Garut

Kekuatan (<i>Strength</i>)	
S1	Komitmen pemerintah daerah tinggi
S2	Kerja sama dan koordinasi antar instansi yang menjadi tim P3DN
S3	Sosialisasi aktif
S4	Pemanfaatan e-katalog

Sumber : Hasil analisis tahun 2025

b. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan (*Weakness*) merupakan kondisi internal yang menjadi penghambat dalam mencapai tujuan. Adapun kelemahan dari komitmen P3DN Kabupaten Garut adalah sebagai berikut :

- 1) Keterbatasan produk dalam negeri. Masih ada kebutuhan produk dengan spesifikasi tertentu yang belum bisa dipenuhi oleh industri lokal, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.
- 2) Ketergantungan pada produk impor strategis. Sektor tertentu, seperti kesehatan dan konstruksi, masih sangat bergantung pada produk impor.
- 3) Kurangnya informasi teknis TKDN di instansi. Tidak semua instansi memahami cara menilai TKDN dan alur perizinan produk impor.
- 4) Sistem swakelola yang belum terdata maksimal dalam sistem e-katalog. Pengadaan melalui swakelola sulit dimonitor dan tidak menunjukkan indikator komitmen P3DN.



Berikut adalah tabel dari kelemahan (*weakness*) komitmen P3DN Kabupaten Garut :

Tabel 2. Kelemahan Komitmen P3DN Kabupaten Garut

Kelemahan (<i>Weakness</i>)	
W1	Keterbatasan produk dalam negeri
W2	Ketergantungan pada produk impor strategis
W3	Kurangnya informasi teknis TKDN di instansi
W4	Sistem swakelola yang belum terdata maksimal dalam sistem e-katalog

Sumber : Hasil analisis tahun 2025

2. Faktor Eksternal

Berikut ini merupakan Faktor eksternal komitmen P3DN Kabupaten Garut yang meliputi Peluang (*Opportunity*) dan Ancaman (*Threats*)

a. Peluang (*Opportunity*)

Peluang yang ada dari tingginya komitmen P3DN kabupaten Garut adalah sebagai berikut :

- 1) Dorongan nasional terhadap P3DN. Pemerintah pusat memberikan insentif dan penghargaan kepada daerah yang memiliki komitmen tinggi terhadap produk dalam negeri.
- 2) Pertumbuhan industri local. Komitmen P3DN mendorong UMKM dan produsen lokal untuk memenuhi permintaan pemerintah daerah.
- 3) Transformasi digital melalui e-katalog. Mendorong sistem pengadaan berbasis teknologi yang transparan dan efisien.
- 4) Kebijakan larangan/pembatasan impor. Kebijakan pembatasan impor nasional menjadi peluang memperkuat daya saing produk lokal di pasar pemerintah.

Berikut ini adalah tabel peluang (*opportunity*) komitmen P3DN kabupaten Garut :

Tabel 3. Peluang Komitmen P3DN Kabupaten Garut

Peluang (<i>Opportunity</i>)	
O1	Dorongan nasional terhadap P3DN
O2	Pertumbuhan industri local
O3	Transformasi digital melalui e-katalog
O4	Kebijakan larangan/pembatasan impor

Sumber : Hasil analisis tahun 2025

b. Ancaman (*Threats*)

Ancaman yang dapat peneliti identifikasi terhadap komitmen P3DN Kabupaten Garut adalah sebagai berikut :

- 1) Tekanan globalisasi dan daya saing produk asing. Persepsi masyarakat dan beberapa instansi masih menganggap produk impor lebih unggul dari segi kualitas.
- 2) Hambatan teknis dan regulasi. Penolakan izin impor dapat memperlambat pelaksanaan proyek jika tidak ada alternatif produk lokal.
- 3) Keterlambatan pembaruan e-katalog. Tidak semua produk lokal terdaftar di e-katalog, menyebabkan ketidaksihinggaan kebutuhan instansi.
- 4) Minimnya SDM terlatih dalam asesmen TKDN. Kekurangan tenaga ahli TKDN berpotensi membuat perhitungan tidak valid atau pengajuan produk impor ditolak.

Berikut adalah tabel dari ancaman (*threats*) komitmen P3DN Kabupaten Garut:

Tabel 4. Ancaman Komitmen P3DN Kabupaten Garut

Ancaman (<i>Threats</i>)	
T1	Tekanan globalisasi dan daya saing produk asing
T2	Hambatan teknis dan regulasi
T3	Keterlambatan pembaruan e-katalog
T4	Minimnya SDM terlatih dalam asesmen TKDN

Sumber : Hasil analisis tahun 2025

Setelah analisis dilakukan, selanjutnya peneliti membuat matriks SWOT. Matriks SWOT merupakan alat yang digunakan untuk mengukur factor internal dan factor eksternal. Pada matriks SWOT ini, dapat dilihat secara jelas bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki atau dihadapi dalam upaya mencapai tujuan. Dalam matriks ini didapat empat sel kemungkinan alternative strategi yang dapat diterapkan, yaitu :

Tabel 5. Matriks SWOT

INTERNAL / EKSTERNAL	STRENGTH	WEAKNESS
	S1 Komitmen pemerintah daerah tinggi S2 Kerja sama dan koordinasi antar instansi yang menjadi tim P3DN S3 Sosialisasi aktif S4 Pemanfaatan e-katalog	W1 Keterbatasan produk dalam negeri W2 Ketergantungan pada produk impor strategis W3 Kurangnya Informasi teknis TKDN di instansi W4 Sistem swakelola yang tidak terdata dalam sistem P3DN
	OPPORTUNITY	W-O
	O1 Dorongan nasional terhadap P3DN O2 Pertumbuhan industri lokal O3 Transformasi digital melalui e-katalog O4 Kebijakan larangan/pembatasan impor	WO1 Fasilitasi pembinaan teknis dan pelatihan kualitas produk untuk UKM dan IKM lokal WO2 Pemberian insentif bagi produsen lokal yang mengembangkan produk pengganti barang impor prioritas WO3 Pelatihan teknis terpadu ASN pengadaan tentang cara penilaian TKDN berbasis sistem digital WO4 Evaluasi ulang mekanisme swakelola agar dapat diselaraskan dengan prinsip P3DN dan melibatkan penyedia lokal
	S-O	W-T
	SO1 Penguatan regulasi internal daerah (Perbup/SK) sebagai tindak lanjut dari arahan nasional P3DN. SO2 Kolaborasi antar instansi untuk mendukung pertumbuhan industri lokal SO3 Sosialisasi intensif tentang pemanfaatan e-katalog dalam transformasi digital SO4 Menggunakan produk yang tidak bersifat <i>close system</i>	WT1 Pembuatan database lokal produk dalam negeri sebagai pendamping sementara e-katalog nasional WT2 Pembuatan sistem pelaporan manual berbasis excel/online untuk pengadaan swakelola
THREATS	S-T	W-T
T1 Tekanan globalisasi dan daya saing produk asing T2 Hambatan teknis dan regulasi T3 Keterlambatan pembaruan e-katalog T4 Minimnya SDM terlatih dalam asesmen TKDN	ST1 Mempertegas sanksi pada setiap pelanggaran yang dilakukan ST2 pengoptimalan kinerja Tim P3DN ST3 Koordinasi aktif dengan LKPP dan penyedia e-katalog lokal untuk mempercepat input produk baru dari UMKM lokal ST4 Integrasi sistem e-katalog dengan SOP perizinan dan penilaian TKDN	



	berbasis digital	yang terintegrasi dengan dashboard P3DN WT3 Integrasi isstem swakelola dengan e-katalog terbaru WT4 Mempercepat perbaruan produk lokal di e-katalog
--	------------------	---

Sumber : Hasil analisis penulis tahun 2025

a. Strategi *Strength-Opportunity* (S-O)

Strategi S-O merupakan strategi yang memaksimalkan aspek internal berupa kekuatan (*strength*) dengan peluang (*opportunity*) yang ada dengan sebesar besarnya. Strategi S-O yang dapat ditempuh oleh tim P3DN Kabupaten Garut, yaitu :

- 1) Penguatan regulasi internal daerah (Perbup/SK) sebagai tindak lanjut dari arahan nasional P3DN. Hal Ini menunjukkan sikap pro-aktif dan keberpihakan pada program P3DN ini.
- 2) Kolaborasi antar instansi untuk mendukung pertumbuhan industri lokal. Tujuannya agar terjalin sinergi dan komunikasi agar pelaksanaan program P3DN juga berdampak pada pertumbuhan industry local yang menjadi lebih baik dari segi kualitas dan kuanitas. Hal ini sejalan dengan pemaparan pelaku industri yang mengatakan bahwa :
“Selama saya menekuni usaha ini, pemerintah sendiri sering melakukan pendataan usaha saya, terkadang juga mereka memberikan informasi terakait spesifikasi produk yang banyak dibutuhkan seperti bentuk *pavingblock* yang banyak dibutuhkan. Jadi saya kan bisa berinovasi supaya penjualan saya meningkat” (wawancara 7 Juli 2025)
- 3) Sosialisasi intensif tentang pemanfaatan e-katalog dalam transformasi digital. Dengan mengadakan pelatihan dan kampanye masif kepada pelaku usaha dan Aparatur Sipil Negara (ASN) tentang cara memanfaatkan e-katalog untuk pengadaan barang/jasa.
- 4) Menggunakan produk yang tidak bersifat *close system*. Menggunakan produk yang memiliki bagian/*sparepart* dengan jenis yang umum dan mudah didapatkan bisa menjadi solusi agar ketergantungan penggunaan produk impor dapat diminimalisir. Strategi ini sejalan dengan informasi dari penyedia barang/jasa yang mengatakan bahwa :
“Sebenarnya waktu kami melakukan reparasi itu kami menemui beberapa produk itu baru kami dengar, jadi kami susah mencari suku cadangnya” (wawancara 7 Juli 2025)

b. Strategi *Strength-Threats* (S-T)

Strategi S-T merupakan strategi yang menggabungkan faktor internal (*strength*) dan faktor eksternal (*threats*). Strategi ini memaksimalkan kekuatan untuk menghadapi berbagai ancaman dari luar. Stretgi S-T yang dapat diterapkan dalam menguatkan komitmen P3DN di Kabupaten Garut adalah :

- 1) Mempertegas sanksi pada setiap pelanggaran yang dilakukan. Sanksi tegas diharapkan dapat memberikan efek jera dan sebagai pertanggung jawaban atas pelanggaran yang dilakukan. Sanksi tegas bisa berupa hukuman pidana, perdata, mutasi ata bahkan pencopotan jabatan.
- 2) Pengoptimalan kinerja tim P3DN. Salah satunya untuk menangani hambatan teknis, untuk mempercepat proses yang dan menghindari keterlambatan pengadaan. Selain itu pengoptimalan ini juga berlaku dalam hal pengawasan dan penilaian masing-masing instansi.
- 3) Koordinasi aktif dengan LKPP dan penyedia e-katalog lokal untuk mempercepat input produk baru dari UMKM atau IKM local. Koordinasi yang dilakukan tidak terbatas pada beberapa produk namun semua produk yang memenuhi kriteria dan dapat digunakan oleh setiap instansi. Selain itu, input produk juga berfungsi agar produk dalam negeri tersedia secara cepat dan kompetitif di sistem elektronik pemerintah. Hal ini sejalan dengan pemaparan pelaku industri yang menyatakan bahwa :
“Kurang tau sebenarnya, tapi saya sering diinformo kalo produk itu ditayangkan ditayangkan dimanya juga kurang paham, katanya menjadi salah satu *paving block* yang kualitasnya lumayan baguslah. saya juga pernah mendapat pesanan adalah dari dinas yang gede. Pesennya itu banyak karena katanya produk kami di rekomendasikan dari pemda” (wawancara 7 Juli 2025)
- 4) Integrasi sistem e-katalog dengan SOP perizinan dan penilaian TKDN berbasis digital. Dengan menyatukan proses dalam satu platform agar pengadaan lebih efisien, transparan, dan tidak membutuhkan tenaga teknis terlalu banyak.

c. Strategi *Weakness – Opportunity* (W-O)

Strategi W-O merupakan strategi yang menggabungkan faktor internal kelemahan (*weakness*) dengan faktor eksternal peluang (*opportunity*). Strategi ini berguna untuk memaksimalkan peluang yang ada untuk mengurangi kelemahan. Strategi yang dapat dilakukan adalah :

- 1) Fasilitasi pembinaan teknis dan pelatihan kualitas produk untuk UKM dan IKM local. Pemerintah dinas terkait dapat bekerja sama dengan para pelaku usaha, atau komunitas usaha untuk dapat meningkatkan kualitas produk agar dapat bersaing dengan produk impor.
- 2) Pemberian insentif bagi produsen lokal yang mengembangkan produk pengganti barang impor prioritas. Dengan mempertimbangkan regulasi dan tingkat kontribusi, produsen local dapat diberikan insentif seperti pengurangan pajak, kemudahan perizinan dan penyediaan, atau diprioritaskan masuk ke dalam e-katalog. Hal ini sejalan dengan informasi pelaku industri yang mengatakan bahwa :
“Saya itu pernah beberapa kali diinformo dari dinas kalo saya itu menjadi salah satu industri yang cukup aktif kerja sama sama dinas. Keuntungan nya itu kadang kalo misal ada yang butuh itu prosesnya jadi



mudah lah. Gak ribet kayak pas awal awal. Soalnya mereka kan tau kita itu gimana. Gak pernah ngecawain lah kalo pake barang dari kita” (wawancara 7 juli 2025)

- 3) Pelatihan teknis terpadu ASN pengadaan tentang cara penilaian TKDN berbasis sistem digital. Dengan meningkatkan teknisi pelaksanaan TKDN, maka diharapkan penilaian TKDN menjadi lebih efektif dan efisien.
- 4) Evaluasi ulang mekanisme swakelola agar dapat diselaraskan dengan prinsip P3DN dan melibatkan penyedia local. Misalnya melalui kerja sama swakelola dengan koperasi atau UMKM lokal untuk menunjukkan dukungan nyata terhadap produk dalam negeri.

d. Strategi *Weakness – Threats (W-T)*

Strategi W-T merupakan strategi yang menggabungkan faktor internal kelemahan (*weakness*) dengan faktor eksternal (*threats*). Strategi ini berusaha menghindari ancaman dari luar dan mengurangi kelemahan yang dimiliki. Strategi W-T yang dapat dilakukan adalah :

- 1) Pembuatan *database* lokal produk dalam negeri sebagai pendamping sementara e-katalog nasional. Digunakan untuk pengadaan berbasis referensi lokal jika e-katalog belum menyediakan produk serupa.
- 2) Pembuatan sistem pelaporan manual berbasis excel/online untuk pengadaan swakelola yang terintegrasi dengan dashboard P3DN. Meski tidak berbasis katalog, proses swakelola tetap dapat dilacak dan diukur komitmen P3DN-nya.
- 3) Integrasi sistem swakelola dengan e-katalog terbaru. Hal ini memungkinkan pelaporan penggunaan material lokal menjadi lebih mudah dan dapat dilakukan kapan saja. Dengan demikian perhitungan komitmen P3DN dapat meningkat.
- 4) Mempercepat pembaruan produk lokal di e-katalog. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya sistem notifikasi real-time untuk UMKM seperti peringatan update spesifikasi produk atau pengingat masa berlaku sertifikat TKDN.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai penguatan komitmen P3DN dalam rangka perizinan penggunaan produk impor di pemerintahan Kabupaten Garut, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Komitmen P3DN pemerintahan daerah Kabupaten Garut tergolong sangat tinggi jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan pemerintah Kabupaten Garut yang mendapat penghargaan dari kementerian perindustrian sebagai kabupaten/kota yang memiliki komitmen P3DN tertinggi seindonesia pada tahun 2024. Ini merupakan pencapaian yang baik bagi pemerintah daerah Kabupaten Garut, yang merupakan hasil kerja sama semua instansi pemerintah Kabupaten Garut dalam menyukseskan program P3DN ini
2. Prosedur perizinan penggunaan impor oleh Tim P3DN kabupaten Garut. sangat kompleks. Hal ini

dibuktikan dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap instansi yang mengajukan. Artinya, tim P3DN sangat menjunjung kehati-hati dalam memberikan izin penggunaan suatu produk. Agar memastikan bahwa perizinan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Garut dalam penguatan komitmen P3DN di lingkungan pemerintahannya adalah, belum tersedianya produk yang berkualitas dan kuantitas yang belum bisa memenuhi kebutuhan instansi. hal ini didasarkan pada perbedaan kebutuhan setiap instansi yang tidak bisa disama ratakan.
4. Berdasarkan analisis swot yang dilakukan terdapat banyak rekomendasi strategi yang dapat dilakukan oleh para pemangku kebijakan dalam pengimplementasian program P3DN di Kabupaten Garut yang berdampak baik bagi pemerintah daerah dan para pelaku industri local. Sehingga strategi yang dirumuskan berdasarkan analisis SWOT bisa dijadikan pertimbangan dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan program P3DN di pemerintahan Kabupaten Garut.

Ucapan Terima Kasih

Atas terbitnya jurnal ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Universitas Wanita Internasional
2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energy Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut
3. Sekretariat Daerah, Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa Kabupaten Garut
4. Pelaku usaha paving block
5. Penyedia barang/jasa computer

Karena telah memberikan izin, tenaga, dan waktu untuk penelitian ini. Sehingga penelitian dapat selesai dengan tepat waktu. Dan kepada semua pihak yang telah terlibat pada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arwildayanto, Sukung, A., & Sumar, W. T. (2018). Analisis Kebijakan Pendidikan: Kajian Teoritis, Eksploratif, dan Aplikatif. CV Cendekia Press.
- Assauri, S. (2018). Manajemen Pemasaran (Dasar, Konsep dan Strategi). PT. Raja Grafindo Persada.
- Ayunani, N. S. (2023). Peranan Perdagangan Internasional Dalam Produktifitas-Pertumbuhan Perekonomian Negara. Mata Hati Media Komunikasi Terbesar Di Malang. <https://tabloidmatahati.com/peranan-perdagangan-internasional-dalam-produktifitas-pertumbuhan-perekonomian-negara/>
- Darmadi. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia. CV Budi Utama.
- Dimand, A.-M., & Neshkova, M. I. (2023). Buying Green In U.S. Local Government: Internal Commitment And Responsiveness To External Pressures. Wiley Online Library : Public Administration., 102(2), 644–667.
- Fenora, C., Bhirawa, W. T., Sumartono, B., & Arianto, B. (2022). Analisis sistem dan prosedur impor produk elektronik life good (lg) incoterm cip dengan



- menggunakan pendekatan dmaic pada pt. pantos logistik indonesia cibitung jawa barat. *Produk Elektronik Life Good*, 7, 13–19. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jti/article/view/950>
- Rangkuty, D. M., & Nasution, L. N. (2018). Analisis Inflasi dan Impor Indonesia. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(2), 180–190. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v18i2.2552>
- Riyanto, W., & Priambodo, I. S. (2024). Strategi Pemenuhan Komitmen Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) pada Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kota Yogyakarta. *Jurnal Pengadaan Barang/Jasa*, 3(2), 74–85.
- Saragi, J. E. M. (2023). Strategi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Pengadaan Barang/Jasa di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Politeknik STAI LAN Jakarta.
- Sembiring, lidya julita. (2018). Ini 3 Strategi Mendag Batasi Impor untuk Selamatkan Rupiah. *CNN Indonesia*. https://www.google.com/search?q=Lidya+Julita+S&oq=Lidya+Julita+S&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIICAEQABgWGB4yCggCEAAAYogQYiQUyBwgDEAAAY7wUyBwgEEAAAY7wUyBwgFEAAAY7wXSAQgxNTYxajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8
- Sirieix, L., Kledal, P. R., & Sulitang, T. S. (2011). Organic food consumers' trade-offs between local or imported, conventional or organic products: a qualitative study in Shanghai. *Interntional Journal Of Consumer Studies*, 35(6), 670–678.
- Sumarno, S., & Nugroho, K. (2024). Dampak Peningkatan Belanja Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi Pertumbuhan Industri Mikro dan Kecil. *Jurnal Pengadaan Indonesia*, 3(1), 9–16.
- Tjiptono, F., & Chandra, G. (2016). *Service, Quality & Satisfaction (Edisi 4)*. Cv.Andi Offset.
- Turnip, E. A. T. (2023). Program P3DN serta Peran Pengawasan Inspektorat dalam Mendorong Percepatan Pelaksanaannya di Lingkungan Setkab. Sekretariat Kabinet Indonesia. <https://setkab.go.id/program-p3dn-serta-peran-pengawasan-inspektorat-dalam-mendorong-percepatan-pelaksanaannya-di-lingkungan-setkab/>